

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19 Di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa

Milenia Jenifer Poluakan¹

Novie R. Pioh²

Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai BLT di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara. Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi di daerah yang disebabkan oleh dampak wabah pandemi *coronavirus disease 2019* (covid-19), dan pandemi di Indonesia sudah hampir 3 tahun. Pemerintah memberi dukungan pada daerah melalui instrumen transfer ke daerah. Salah satu dukungan dari pemerintah tersebut diberikan kepada daerah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai yang biasa disebut BLT . BLT ini merupakan salah satu bentuk *social safety net* atau program jaring pengaman sosial yang diperuntukan bagi warga yang terdampak akibat covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dilihat dari standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLT di kelurahan uner belum berjalan dengan baik karena tidak diperhatikan baik-baik dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLT tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga belum tepat sasaran. Dilihat dari sikap atau disposisi para pelaksana dalam hal ini pemerintah kelurahan mengarah pada permasalahan yang diakibatkan Covid-19 karena itu pemerintah sudah mengimplementasikan dengan baik tetapi harus lebih jeli dalam pendataan agar memberikan pelayanan dan program yang sesuai dengan permasalahan ditengah pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Implementasi, BLT, Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

COVID 19 merupakan keluarga besar virus yang telah mewabah di seluruh dunia yang menimbulkan penyakit terhadap makhluk hidup, yaitu manusia. Virus corona menyerang manusia biasanya dapat ditandai dengan penyakit infeksi pada saluran pernapasan seperti sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Resoiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*

Setiap negara melakukan berbagai cara dan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona, tetapi virus corona berhasil masuk hingga tersebar di setiap negara yang mengakibatkan banyaknya nyawa manusia hilang atau meninggal dunia. Salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona adalah melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial, namun hal tersebut berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi. Jika reproduksi dan konsumsi menurun akibat kondisi masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah (*stay at home*) maka terjadi perekonomian yang tidak stabil sehingga kesejahteraan masyarakat menurun.

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada bulan maret 2020. Pandemi COVID-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang buruk sehingga dapat mempengaruhi serta menurunkan taraf hidup masyarakat. Hal ini ditimbulkan adanya batasan kegiatan ekonomi sehingga melemahnya pertumbuhan

ekonomi, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan yang dapat menaikkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut.

Dalam merealisasikan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi *corona virus disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini menjadi salah satu kebijakan yang mendasari program terbentuknya bantuan sosial Covid-19 di masyarakat salah satunya Bantuan Langsung Tunai.

Salah satu dari sekian banyak program pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 di desa, berupa bantuan keuangan berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT jika memenuhi kriteria dan diberikan selama 3(tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 setiap bulan. BLT bebas pajak, jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh

desa, kepala desa, bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan langsung tunai. Menurut Keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdeus), usulan itu harus disertai alasan penambahan alokasi (PPN/Bappenas,2020)

Minahasa yang mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara merupakan salah satu desa/kelurahan yang menjalankan program BLT selama pandemi COVID-19.

Di Kelurahan Uner terdapat 3 lingkungan dan penerima BLT sebanyak 189 keluarga penerima dan sekitar 500 anggota masyarakat Uner, dan dalam penerima BLT itu juga ada yang mendapat bantuan selain BLT. Dengan demikian, pemerintah memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat dengan harapan dapat bermanfaat, membantru mencukupi kebutuhan sehari-hari, mengurangi beban masyarakat akibat dampak COVID-19.

Dan dengan adanya program dari pemerintah sendiri yang membuat saya tertarik untuk mengetahui bagaimana cara penyaluran bantuan tersebut karena masih terdapat permasalahan dalam pemberian bantuan tersebut dan ada pengeluhan tentang penyaluran bantuan tersebut.

Masyarakat mengeluhkan ada peserta/keluarga yang layak mendapatkan program ini tidak terdata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai bahkan ada yang mendapat bantuan ganda, ada juga yang awalnya menerima bantuan tersebut dan penerimaan berikut sudah tidak menerima, ada yang terdaftar dan

disaat pergi ke kantor pos tidak mendapat bantuan tersebut.

Selain itu Program BLT di Kelurahan Uner data yang dipakai tidak dilakukan revisi atau di verifikasi sehingga ada yang sudah menerima bantuan-bantuan lain selain BLT. Meski sudah mendapat bantuan itu tetapi masih ada saja yang mendapatkan BLT dan karena itu data penerima BLT harus diupdate dan diverifikasi agar bisa diketahui dan dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan dan pantas untuk dapat bantuan tersebut karena di kelurahan uner banyak yang kedapatan mendapat bantuan ganda.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Model Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dikemukakan ada 6 (enam) variabel yang dipengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Standar dan tujuan
- 2) Sumber daya
- 3) Komunikasai antar organisasi
- 4) Karakteristik agen organisasi
- 5) Kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik
- 6) Sikap atau disposisi

Informan merupakan orang kepercayaan yang dapat membagikan informasi kepada peneliti dengan tepai sesuai kejadian sebagai kelengkapan data penelitian atau disebut narasumber sebagainya dalam penelitian dan Informan dalam penelitian ini merupakan terdiri atas :

- 1) -Lurah
- 2) -Kepala Lingkungan
- 3) Masyarakat Penerima BLT : 3 Orang

Pembahasan

1. Standar Kebijakan dan Sasaran Kebijakan

Standar kebijakan dan sasaran kebijakan sangat berperan penting dalam dunia implementasi kebijakan, apabila standar kebijakan dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Kinerja implementasi kebijakan tentunya yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Program Bantuan Langsung Tunai ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemic Covid-19 pemberian BLT ini tidak diberikan dengan cuma-cuma ada tujuan, sasaran dan kriteria untuk menerima Bantuan ini agar program ini dapat tepat sasaran sesuai ketentuan yang ditetapkan, pada jumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima BLT dibagikan sama rata tidak ada pemotongan namun ada masalah dalam sasaran program BLT terdapat masyarakat penerima tetapi sudah menerima bantuan lain jadi masyarakat menerima dua bantuan seharusnya itu tidak terjadi dan menurut Lurah bahwa dalam penyaluran ini data yang diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Bapak Lurah Meidy sada S.IP mengatakan bantuan ini sudah tepat sasaran "*bantuan langsung tunai ini kami ambil data-data dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) jadi kami menyalurkan program ini melihat data dari DTKS jadi dalam penyaluran bantuan BLT ini sudah sangat tepat sasaran dan untuk buat masyarakat yang sudah menerima bantuan lain selain BLT yang saya*

ketahui jika masyarakat ada yang menerima bantuan selain BLT akan dicabut atau tidak dapat menerima bantuan BLT lagi dan walaupun keluarga tersebut sudah mendapat bantuan tersebut di gelombang pertama pasti akan ada pengecekan data jikalau keluarga tersebut sudah mendapat bantuan lain selain BLT akan di berhentikan dalam penerima BLT di penerimaan gelombang kedua.

Secara garis besar yang dikatakan oleh Lurah kelurahan uner adalah dalam penyaluran BLT ini sudah tepat sasaran dan jika kedapatan ada masyarakat atau keluarga yang mendapat bantuan selain BLT pasti akan ada pengecekan data ulang. Dan peneliti juga mencari informasi kepada masyarakat atau keluarga penerima bantuan langsung tunai, dan disaat di wawancara pada masyarakat penerima bantuan langsung tunai salah satu ibu menyatakan bahwa dia menerima BLT di gelombang pertama tetapi disaat akan menerima BLT di gelombang Dan setelah peneliti mendengar itu peneliti pun bertanya apakah ibu menerima bantuan lain selain BLT. Ibu Norma mengatakan dia sebelum menerima BLT dia menerima bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau bantuan yang berupa sembako dll, dan setelah kejadian ini dia tidak mendapat bantuan BLT lagi dan saat juga jadwal penerimaan bantuan BPNT beliau pergi ketempat pengambilan bantuan tersebut dan ternyata ibu tersebut juga sudah tidak terdaftar sebagai BPNT karena sudah diketahui mendapat BLT sehingga BPNT pun sudah tidak terdaftar sebagai penerima dan sampai sekarang Keluarga tersebut sudah tidak pernah mendapat bantuan baik itu BLT ataupun BPNT karena sudah tidak terdaftar lagi.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan keberhasilan Implementasi Kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, Sumber daya yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan segala sumber daya finansial tanpa adanya sumber daya memadai suatu kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik.

Dan mengenai sumber daya boleh dikatakan memadai dilihat dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT karena dalam 1 lingkungan terdapat 3 anggota yaitu 1 kordinator lingkungan dan 2 Pembantu lingkungan dan kelurahan uner memiliki 3 lingkungan jadi yang menjalankan tugas dalam penyaluran Bantuan ini ada 9 orang dan itu sangat memadai dan menurut ibu Rivana Ponamon selaku Pembantu lingkungan *“dalam proses penyaluran Bantuan langsung ini semua perangkat lingkungan yang ada di masing-masing lingkungan sudah ditugaskan dalam penyaluran bantuan tersebut, sehingga bisa dikatakan memadai karena dalam setiap lingkungan terdapat 3 orang”*. Seperti yang telah dikatakan ibu rivana bahwa sangat memadai dalam penyaluran tersebut karena perangkat pemerintah yang merupakan lembaga pemerintah terdekat dengan masyarakat dan saling berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bertugas dan membantu masyarakat, begitupun juga yang disampaikan oleh ibu grace beliau mengatakan *“ kalau dilihat dari perangkat yang ada di lingkungan kami mereka sangat membantu kami dalam penyaluran bantuan ini karena seringkali masyarakat yang ada di lingkungan kami sering kurang update atau kurang megerti, sehingga dengan adanya*

perangkat pemerintah ini yang boleh membantu kami masyarakat dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini”

3. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Dalam banyak program implementasi kebijakan sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait. Yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunkasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan dan sasarnya.

Dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dinilai sudah terjalin komunikasi yang baik antar instansi baik organisasi pemerintah atau non pemerintah. Dan menurut salah satu masyarakat mengatakan *“dalam penyaluran BLT ini kepala lingkungan dan pembantu lingkungan yang datang menghubungi dan memberitahukan kepada keluarga-keluarga yang menerima bantuan langsung tunai.”*

Dalam penyaluran bantuan di Kelurahan uner tidak ada sosialisasi kepada masyarakat hanya langsung datang menghubungi kepada keluarga-keluarga penerima untuk datang ke kantor pos.

4. Karakteristik agen organisasi

Yang dimaksud karakteristik agen/Badan-badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan

berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan dan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Konsepsi tentang struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau tata aliran program yang mampu mendukung penerapan kebijakan, agar dapat tercapai program yang ditentukan dari atas melalui prosedur yang ada.

Dalam penelitian ini sehubungan dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) Program BLT di Kelurahan uner dapat dikatakan bahwa Lurah dan perangkat pemerintah sebagai implementor kebijakan sudah memiliki standard operasional prosedur yang dilihat dengan proses penyaluran program Bantuan Langsung Tunai yang dibuat dan ditetapkan dengan keputusan.

Dan dalam proses penyaluran ini dengan karakteristik agen pelaksana tau seluruh pihak yang mensukseskan penyaluran ini menurut ibu meytha” *dalam proses penyaluraan yang dilakukan oleh para pihak yang dengan segala keputusan yang telah dibuat mereka sudah bisa dibilang sudah lumayan baik,karena yang saya lihat dalam mereka menjalankan tugas mereka, dan mereka kompak dalam menjalankan tugas mereka sebagai aparat pemerintah kelurahan”*

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

.Berdasarkan hasil penelitian dari salah satu keterlibatan lingkungan sosial pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai masih adanya sikap kecenderungan di tengah masyarakat yaitu munculnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat bukan hanya ada

kecemburuan tetapi ada yang mengatakan kalau pemerintah pilih kasih atau karena dalam kelompok lingkungan ada yang tidak suka dengan pimpinan lingkungan beranggapan karna hal itu sampai mereka tidak terdaftar tergantung bagaimana sikap kita menyikapinya masing-masing seperti juga yang disampaikan menurut ibu pembantu lingkungan ibu Rivana ponamon *”sempat sampai ketelinga kami perangkat pemerintah bahwa ada yang merasa kecemburuan karena mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut, dan kami pun hanya bisa menjelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan ini tidak ada campur tangan kami, dan kami pun tidak tahu siapa saja yang akan keluar nama keluarga mereka, karena data nama-nama keluarga yang keluar dari DTSK (data terpadu kesejahteraan sosial).*

Padahal dalam program ini dibagikan kepada masyarakat adanya tujuan, sasaran, dan kriteria penerima bantuan ini tapi namanya bantuan sosial pasti akan ada timbul kecemburuan sosial ditengah masyarakat.

6. Sikap atau disposisi

Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh

pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi khususnya mengutamakan kepentingan warga.

Implementasi Bantuan Langsung Tunai ke masyarakat kelurahan Uner di tahun 2020 merupakan salah satu bentuk dari kebijakan, dimana sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, program bantuan langsung tunai ini dibuat dengan tujuan didalamnya yakni untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di tahun 2020.

Dan program Bantuan Langsung Tunai di kelurahan Uner sudah dapat dilihat implementasinya, menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke beberapa masyarakat dana BLT yang didapat mampu meredakan sedikit perekonomian masyarakat di masa pandemi ditambah lagi pada tahun 2020 memang pada saat-saatnya tidak boleh keluar, bekerja pun tidak bisa dan dengan adanya bantuan ini bisa membantu kepada keluarga yang membutuhkan bantuan tersebut.

Dalam sebuah kebijakan, terdapat aktor-aktor dalam kebijakan sebagai pelaksana kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat terjadi, seperti dalam program BLT di Kelurahan Uner aktor-aktor yang dimaksud adalah Lurah beserta dengan perangkat kelurahan merupakan aktor yang terlibat dan apabila proses pelaksanaan tersebut dilakukan sehingga memberikan dampak kepada masyarakat maka akan terdapat implementasi kebijakan didalamnya seperti yang telah dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Untuk itu peneliti dalam pembahasan ini memang tidak dapat dipungkiri

terdapat beberapa hambatan dalam dalam prose pendistribusian yakni kurang berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Dimasyarakat dana bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dimasa pandemi, untuk itu seharusnya pemerintah dalam proses pendistribusian dana bantuan harus berjalan lebih efektif dan lebih jeli lagi dalam pendataan agar tidak ada lagi rasa kekecewaan pada masyarakat penerima bantuan.

Penutup

Kesimpulan

1. Dilihat dari standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLT di kelurahan uner belum berjalan dengan baik karena tidak diperhatikan baik-baik dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLT tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga belum tepat sasaran.
2. Dilihat dari Sumber Daya pelaksana program penyaluran BLT di Kelurahan uner kecamatan Kawangkoan Utara dinilai dari sumber daya manusia sudah cukup memadai dalam penyaluran bantuan tersebut dan juga dapat mengontrol jalannya program ini
3. Dilihat dari Komunikasi antar Organisasi dalam program ini disimpulkan bahwa dalam komunikasi antar penyelenggara dengan masyarakat dalam program ini sudah lumayan baik dalam saling berkomunikasi agar program Bantuan Langsung Tunai ini agar bisa berjalan dengan begitu baik
4. Karakteristik Agen Pelaksana dalam melaksanakan program ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik

atau sifat yang ditunjukkan agen pelaksana baik-baik saja hal ini tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai yang ada di Kelurahan Uner

5. Dilihat dari kondisi atau keterlibatan antara lingkungan sosial politik dan ekonomi dapat disimpulkan pelaksanaan program BLT ini sudah berhasil dilaksanakan namun dalam keterlibatan sosial program bantuan ini dapat mendatangkan kecemburuan sosial atau ketimpangan sosial di kalangan masyarakat
6. Dilihat dari sikap atau disposisi para pelaksana dalam hal ini pemerintah kelurahan mengarah pada permasalahan yang diakibatkan Covid-19 karena itu pemerintah sudah mengimplementasikan dengan baik tetapi harus lebih jeli dalam pendataan agar memberikan pelayanan dan program yang sesuai

Saran

1. Berkaitan dengan standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam program bantuan langsung tunai ini terdapat belum tepat sasaran masih ada kesalahan, kedapatan masyarakat yang menerima bantuan lain tapi menerima BLT maka dari itu penyaluran BLT berikutnya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi yaitu memastikan data valid maka data bantuan dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan dilapangan, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta dilapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus melaporkan ke Dinas sosial atau pusat data untuk perbaikan DTKS agar tidak terjadi akan

kesalahpahaman dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan tidak membuat masyarakat lebih tersiksa dengan bantuan tersebut.

2. Berkaitan dengan sumber daya agar dalam penyaluran program ini berjalan dengan baik disarankan agar lebih saling bekerja sama dan lebih jeli agar program ini berjalan dengan sangat baik
3. Berkaitan dengan komunikasi yang sudah cukup berjalan dengan baik harus dipertahankan karena dalam pelaksanaan bantuan seperti ini yang sangat dibutuhkan yaitu komunikasi antara masyarakat dan pemerintah jikalau komunikasi tidak baik bagaimana program ini akan berjalan dengan baik.
4. Berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana dimana karakteristik agen pelaksana tidak ada penyimpangan untuk program ini dan berharap dalam penerimaan bantuan selanjutnya karakteristik setiap para agen pelaksana program ini untuk lebih ditingkatkan agar mencapai tujuan program yang diharapkan.
5. Berkaitan dengan kondisi ekonomi politik dan sosial pada pelaksana BLT ini agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan program BLT ini dan tak hanya program BLT saja tetapi program-program bantuan lainnya agar tidak terulang kecemburuan di tengah-tengah masyarakat dan berharap agar masyarakat saling membantu dan menerima satu sama lain percuma dalam program berhasil tetapi dalam kekeluargaan masyarakat hilang hanya karena bantuan tersebut karena saling cemburu.
6. Berkaitan dengan sikap atau disposisi agen pelaksana yang

sudah bertanggung jawab dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dan diharapkan pada pelaksanaan program BLT berikutnya dapat ditingkatkan.

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/bantuan_langsung_tunai
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3072>
- <https://itrev.kemenkeu.go.id>
- <https://jurnal.utu.ac.id>
- <https://repository.umy.ac.id>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelurahan>.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2021). Kemiskinan dan Ketimpangan

[https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-](https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#ViewTab1)

[ketimpangan.html#ViewTab1](https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#ViewTab1)

Hanoatubun, S. (2020). Dampak covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia.

Journal of Education, Psychology, and Counseling

Indrawati, S. M (2005). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta:

Jakarta :Meneg PPN

PPN/Bappenas, k. (2020). *Panduan pendataan Bantuan Langsung Tunai* . Deputi

Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Subagyo, P. J. (2011). *Motode Penelitian dalam teori dan Praktek* . Jakarta : PT Rineka Cipta

Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta

Alfabeta

Sugono, D. Dkk. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:

Jakarta: Pusat Bahasa

Tersiana, A. (2018). *Metode Peneltian*. Yogyakarta: Start Up.

Sumber Lain :

- PMK 190 tahun 2021 tentang besaran BLT
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2020